

WARISAN BUDAYA KOTA DENPASAR DALAM PERSPEKTIF POSMODERNISME*)

Oleh
I Wayan Ardika
ardika52@yahoo.co.id
Universitas Udayana

Pendahuluan

Posmodernisme adalah sebuah istilah atau tren akademis dan sebagai tanggapan terhadap perubahan-perubahan substantif dalam pengorganisasian dan kenyataan sosial yang kita hadapi saat ini. Selain istilah Posmodernisme, muncul pula istilah pascamodernitas yang sering dicampuradukan satu dengan yang lainnya. Perbedaan kedua istilah tersebut secara sederhana dibedakan sebagai berikut. Pascamodernisme merujuk pada persoalan seputar budaya dan pengetahuan, sedangkan pascamodernitas terkait erat dengan pola-pola pengorganisasian sosial yang bersifat historis. Dengan demikian, konsep posmodernisme bisa dimengerti setidaknya dalam dua aras yakni gaya atau style kultural yang ditandai oleh intertektualitas, ironi, pastiche, pengaburan batas-batas genre dan bricolage atau penyusunan kembali dan penyejajaran objek-objek penanda yang tadinya saling terkait untuk memproduksi makna-makna yang baru dalam konteks yang segar (Barker, 2014: 25, 223).

Para teoritikus sosial-budaya sekarang sependapat bahwa teori sosial-budaya modern dianggap tidak dapat dan tidak tepat lagi digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial budaya sekarang yang telah jauh berbeda dengan fenomena yang digambarkan oleh Marx, Durkheim, Parson, Freud dan para ilmuwan modern lainnya yang membahas tentang permasalahan modernitas seperti: perlunya rasionalisasi, metode yang dianggap dapat meraih ilmu pengetahuan yang objektif-universal, permasalahan buruh dan pemilik modal atau permasalahan sekularisasi. Ilmuwan sosial-budaya sekarang dihadapkan pada problem baru dengan munculnya gerakan teori

*) Makalah disampaikan dalam Seminar Kota Denpasar dengan Tema: Pelestarian Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan di Era Disruption pada tanggal 6 Juni 2018 di Denpasar

sosial baru seperti cultural studies, feminisme, teori postkolonial, multikulturalisme, kajian etnis dan ras, kajian realitas virtual, ekonomi virtual, dan politik virtual yang lahir sebagai pengaruh teori kritis, postmodern (Lubis, 2016: 3).

Ciri-ciri masyarakat postmodernisme antara lain sebagai berikut. 1) Globalisasi menyebabkan menyebabkan bangsa-bangsa dan wilayah semakin terhubung satu dengan lainnya sehingga mengaburkan perbedaan antara wilayah yang maju (dunia pertama) dengan bangsa dan wilayah terkebelakang (dunia ketiga) Pada era informasi ini tidak ada satu negara atau wilayah pun di dunia yang dapat mengurung diri dalam batas geografisnya, 2) Dalam pemikiran postmodernisme dimensi lokal dan global beriringan, karena itu sering juga disebut global paradoks, 3) Postmodernisme adalah akhir sejarah (diskontinuitas) atau keterputusan sejarah yang halus. Akhir pertentangan antara ideologi kapitalis dan sosialis, dan semakin merajalelanya kapitalisme global (neo kapitalisme), 4) Era informasi dan hiburan, 5) Era simulasi dan hiperreality. Masyarakat yang tersimulasi, tertipu dalam dunia citraan dan wacana. 6) Polivokalitas atau segala sesuatu atau objek dapat dikemukakan dengan perspektif atau paradigma yang berbeda, yang kedudukannya satu sama lain memiliki kesejajaran. Ilmu pengetahuan dihadapkan pada "multi-narasi" yang satu sama lain saling melengkapi dan saling bersaing dimana satu perspektif atau paradigma tidak memiliki keunggulan epistemologis dari yang lain, 7) Kematian analisis oposisi biner, yang memunculkan keanekaragaman/pluralitas posisi subjek atau manusia, 8) Kritik terhadap narasi besar, sehingga Postmodernisme lebih memercayai polivokalitas dan keanekaragaman daripada keseragaman. 9) Postmodernisme memberi peluang pada kelompok yang selama ini terpinggirkan, yang memunculkan gerakan dan perjuangan serta penghargaan pada multikulturalisme (Lubis, 2016: 4-6).

Selaras dengan ciri-ciri postmodernisme tersebut di atas, sejumlah asas Pemajuan Kebudayaan yang tertera pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 memiliki kemiripan antara lain: toleransi, keberagaman, kelokalan, partisipatif, kesederajatan, dan gotong royong. Lebih lanjut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bertujuan antara lain untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya

*) Makalah disampaikan dalam Seminar Kota Denpasar dengan Tema: Pelestarian Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan di Era Disruption pada tanggal 6 Juni 2018 di Denpasar

bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa.

Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2017 antara lain meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olah raga tradisional.

Postmodernisme ditandai oleh perasaan yang disarati dengan ambiguitas, ketidakpastian, dan keterpecahan (fragmentaris) hidup dalam konteks kecepatan (ritme hidup) yang semakin tinggi. Perasaan ini bergandengan tangan kesadaran akan pentingnya kontingensi dalam penghayatan hidup masa kini. Budaya pascamodern dilihat lebih memberi ruang pada budaya visual daripada jenis-jenis budaya yang mendahuluinya dan berlangsung tren estetisasi hidup sehari-hari.

Selain itu, budaya pascamodern ditandai dengan mengaburnya batasan-batasan historis, estetis, dan budaya modern, termasuk di dalamnya distingsi antara budaya dengan seni, budaya rendah dengan budaya tinggi, barang-barang komersial dan karya seni, budaya dan perdagangan. Gaya budaya postmodern yang paling sentral dan dengan mudah bisa diamati dalam arsitektur, film, dan video musik populer. Sebagai contohnya MTV lagi dibicarakan.

Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan salah satu ciri paradigma postmodernisme yang dikemukakan oleh Francois Lyotard. Menurut Lyotard penolakan postmodernisme terhadap *totalizing explanation* atau *grand-narrative*, sehingga lebih cenderung mengungkap narasi-narasi kecil atau lokal (Lubis, 2016: 24). Oleh karena itu paradigma postmodernisme mencari dan mengungkap kearifan-kearifan lokal. Dalam konteks warisan budaya Kota Denpasar, kearifan lokal yang perlu diperhatikan dan mungkin pula diangkat atau diusulkan sebagai warisan budaya nasional maupun global adalah tata letak puri atau jero di Kota Denpasar, yang berlandaskan *catus patha* atau *pempatan agung*. Puri Denpasar sebagai pusat pemerintahan kerajaan Badung diyakini terletak di arah timur laut perempatan jalan Udayana-Veteran, dan Jalan Gajahmada-Surapati (Jayaasabha sebagai rumah jabatan Gubernur). Puri

*J Makalah disampaikan dalam Seminar Kota Denpasar dengan Tema: Pelestarian Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan di Era Disruption pada tanggal 6 Juni 2018 di Denpasar

Pemecutan sebagai pusat kedua pemerintahan kerajaan Badung juga terletak di arah timur laut perempatan Jalan Hasanudin-Imam Bonjol. Demikian pula Puri Kesiman terletak di arah timur laut perempatan Jalan Supratman-Jalan Surabi-Jalan Sokawati, Puri Satria terletak di arah timur laut perempatan Jalan Veteran-Jalan Kedondong-Jalan Abimayu, serta Puri/Jero Kuta juga di arah timur laut perempatan Jalan Sutomo-Jalan Gambuh-Jalan Kumbakarna. Sejumlah puri di Denpasar terletak pada arah timur laut yang dianggap sebagai lokasi terbaik dalam tata nilai kosmologi Hindu Bali (Widiastuti, 2011: 1, gambar 1).

Konsep *catus patha* atau *perempatan agung* dapat diangkat sebagai kearifan lokal untuk tata letak puri di Denpasar khususnya mungkin pula di Bali, sebagai refleksi nilai-nilai kosmologi Hindu Bali. Tata letak puri di Denpasar dalam kaitannya dengan *catus patha* atau *perempatan agung* hampir tidak mengalami perubahan yang berarti dari masa lalu hingga saat ini. Fenomena ini mungkin dapat diusulkan sebagai keraifan lokal ke tingkat nasional maupun internasional seperti Unesco. Prof Darna Putra dkk (2017: 51-53) telah mengusulkan Denpasar Heritage tracking untuk city tour Kota Denpasar yang berawal dari Bali Hotel, ke Jayasabha, lapangan Puputan Badung, Museum Bali, kemudian lewat Jalan Udayana ke Jalan Baliton, Jalan Tamrin menuju Puri Pamecutan, selanjutnya ke Puri/Jero Kuta. Pura Maospahit, Jalan Gajahmada. Route city tour ini dapat dilanjutkan untuk menjadi "one day tour" ke Puri Satria, Puri Kesiman, Art Centre/Taman Budaya, dan kembali ke Museum Bali. Pengembangan city tour di Kota Denpasar harus didukung oleh seluruh stake holder/ pengampu kepentingan lainnya seperti warga puri dan masyarakat secara keseluruhan. Seperti dilaporkan oleh Prof Darna Putra dkk bahwa fasilitas parkir misalnya belum dimiliki oleh puri yang dilalui untuk Denpasar Heritage Tracking city tour tersebut. Komitmen dan koordinasi para pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan Heritage City Tour yang sudah dirancang sebelumnya. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata perlu bersinergi dengan pemilik puri dan masyarakat secara keseluruhan, dan para pihak harus berkomitmen untuk memanfaatkan warisan budaya Kota Denpasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain tata letak *catus patha* atau *perempatan agung*, yang bersifat tangible dan intangible (karena mengandung nilai-nilai filosofis dan kosmologis), seniman Denpasar sebagai agen perubahan *) Makalah disampaikan dalam Seminar Kota Denpasar dengan Tema: Pelestarian Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan di Era Disruption pada tanggal 6 Juni 2018 di Denpasar

dan inovator perlu juga diperhatikan. Ida Boda diketahui mengajar tari legong di Busungbiu, dan pada saat yang sama I Made Regog belajar tabuh pakebyaran di sana, hal ini dapat dianggap sebagai pertukaran (*pasitur*)(wawancara dengan Dr Edward Herbst tanggal 26 Mei 2018). Seniman sebagai agen-agen perubahan dan inovator di Kota Denpasar perlu juga mendapat perhatian baik laki-laki maupun perempuan di Era postmodernisme ini..

Keberagaman dan Multikulturalisme

Paradigma postmodernisme menekankan adanya keberagaman, bukan keseragaman yang akhirnya diharapkan dapat mewujudkan ideologi multikulturalisme. Dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga ditekankan keragaman budaya atau memperkaya keberagaman budaya. Dalam konteks ini Kota Denpasar agar dipandang sebagai masyarakat yang multikulturalisme, yang mengagungkan kesetaraan, kesejajaran, saling menghormati satu dengan yang lain, dan menjunjung toleransi. Kota Denpasar sebagai sebuah kota yang bersifat plural atau multikultur sudah terjadi pada masa kolonial, dan mungkin pula sejak jaman kerajaan tempo dulu. Pada masa kolonial, orang-orang Belanda dan Eropa lainnya terkonsentrasi di sekitar *catus patha*, sedangkan orang-orang Cina, Arab dan India di luarnya (Widiastuti, 2011). Bila diamati realita pada masa kini, pemukiman etnis China atau Tiongkok terkonsentrasi di Jalan Gajah Mada dan Jalan Kartini, sedangkan etnik Arab dan Indi di Jalan Sulawesi. Permukiman etnik China, Arab, dan India terkonsentrasi di dekat pasar Badung, sebagai pusat perekonomian di Kota Denpasar. Konsentrasi permukiman masyarakat non Bali terutamanya di sekitar pasar Badung mencerminkan pluralitas penduduk Kota Denpasar. Pluralitas atau multikultur ini perlu dilestarikan dan dibina guna mewujudkan Denpasar sebagai kota yang bersifat multikulturalisme. Penduduknya yang menghargai perbedaan, kesejajaran, kesederajatan, dan saling menghormati dan menghargai satu dengan lainnya. Selain pluralitas secara etnis, kesenian dan praktik budaya yang berkembang di Kota Denpasar juga beragama. *Ngerebong* masih eksis di Kesiman, baris Cina di Banjar Renon/Sanur, *omed-omedan* di Sesetan. *Rodat/Rudat* di Kepaon, dan gambuh di Pedungan (Mardika dkk., 2010: 105-111) . Keragaman kesenian atau praktik

*) Makalah disampaikan dalam Seminar Kota Denpasar dengan Tema: Pelestarian Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan di Era Disruption pada tanggal 6 Juni 2018 di Denpasar

budaya di Kota Denpasar perlu dibina dan dilestarikan sebagai modal budaya yang dapat dikonfervasi nantinya menjadi modal ekonomi. Keberadaan Pura Jagatnatha di Kota Denpasar dapat dipandang sebagai media untuk menumbuhkan benih-benih multikulturalisme di Kota Denpasar. Siapa saja diizinkan sembahyang di Pura Jagatnatha tanpa memandang asal-usul/tempat asal, klan atau soroh, dan wangsa/warna. Realita ini perlu ditumbuhkan untuk memupuk sikap toleransi, kesederajatan, kesejajaran di kalangan umat yang melakukan persembahyangan di Pura jaganatha, terutamanya di kalangan generasi muda umat Hindu di Kota Denpasar. Berbagai kegiatan keagamaan seperti nyastra, dharmagita, dharmawacana untuk generasi muda atau sekaa teruna/teruni Kota Denpasar perlu digelar secara berkala dan terencana di Pura Jagatnatha. Kegiatan ini diharapkan dapat memupuk kesadaran beragama, rasa toleransi, kesederajatan, dan kesejajaran di kalangan generasi muda umat Hindu Kota Denpasar.

Bahasa

Isu bahasa adalah isu pokok bagi budaya dan Era postmodernisme. Bahasa dianggap penting untuk memahami budaya karena dua alasan pokok yaitu *pertama*, bahasa adalah medium khas dan khusus dimana makna-makna budaya dibentuk dan dikomunikasikan, dan *kedua* bahasa adalah sarana dan medium primer yang digunakan untuk membentuk pengetahuan tentang diri kita sendiri dan tentang dunia sosial. Bahasa membentuk jaringan yang lewatnya kita mengklasifikasikan kenyataan dan membuatnya menjadi bermakna, artinya, bersifat kultural (Barker, 2014: 151).

Bahasa memberikan makna bagi objek-objek material dan praktik-praktik sosial yang kita lakukan. Menurut Wittgenstein bahasa adalah alat yang digunakan manusia untuk mengordinasi tindakan-tindakan dalam konteks relasi sosial. Makna sebuah kata terletak dalam penggunaannya oleh manusia dalam bingkai kehidupan yang spesifik. Misalnya, ungkapan "*Denpasar Kota Berwawasan Budaya*". Maknanya bahwa setiap perilaku dan tindakan penduduk Kota Denpasar agar mengacu pada budaya Bali yang dilandasi oleh filosofi Tri Hita Karana yaitu: secara vertikal harmonis dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, secara horisontal harmonis dengan sesama manusia, dan harmonis dengan lingkungan alam semesta.

*) Makalah disampaikan dalam Seminar Kota Denpasar dengan Tema: Pelestarian Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan di Era Disruption pada tanggal 6 Juni 2018 di Denpasar

Dalam konteks bahasa, berbagai kajian tentang warisan/pusaka Kota Denpasar seperti Kebudayaan Unggul. Inventori Unsur Unggulan sebagai Basis Kota Denpasar Kreatif, Pusaka Budaya. Reresetasi Ragam Pusaka dan Tantangan Konservasi di Kota Denpasar, Bali dan lain-lain agar diinformasikan kepada generasi muda Kota Denpasar melalui sekolah-sekolah dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi di Kota Denpasar, atau melalui web site kota Denpasar sehingga mudah diakses oleh setiap warga Denpasar.

PENUTUP

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji warisan budaya Kota Denpasar dengan paradigma postmodernisme yang berlandaskan pada kearifan lokal atau kelokalan (narasi kecil), keberagaman (pluralitas menuju multikulturalisme), dan peran media sebagai wahana informasi untuk pemahaman dan pelestarian warisan budaya tersebut. Kearifan lokal seperti tata letak puri/jero di Denpasar yang dilandasi oleh konsep *catus patha* atau *pempatan agung* perlu diangkat dan diusulkan ke tingkat nasional sebagai cagar budaya nasional, bahkan ke tingkat internasional sebagai warisan budaya dunia.

Keberagaman atau pluralitas etnik, praktik budaya, dan kesenian di Kota Denpasar perlu dilestarikan dan dibina dalam upaya mewujudkan Kota Denpasar yang berlandaskan ideologi multikulturalisme sehingga nilai-nilai Tri Hita karana, rasa toleransi, kesederajatan, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain dapat terwujud. Pemajuan kebudayaan berlandaskan feminisme sehingga terjadi kesetaraan antara laki-laki dan wanita di Kota Denpasar.

Penyebaran informasi berupa karya-karya tulis tentang warisan/pusaka budaya, budaya unggul Kota Denpasar perlu dilakukan ke sekolah-sekolah menengah hingga perguruan tinggi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda terhadap warisan/pusaka budaya dan budaya unggul Kota Denpasar. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan sekaligus upaya pelestarian warisan/pusaka budaya sebagai jati diri dan modal budaya Kota Denpasar.

*) Makalah disampaikan dalam Seminar Kota Denpasar dengan Tema: Pelestarian Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan di Era Disruption pada tanggal 6 Juni 2018 di Denpasar

Daftar Pustaka

- Astra, I Gde Semadi, I Nyoman Wardi, I Gst. Made Suarbhawa. 2016. *Prasasti Blanjong Tugu Proklamasi Pembentukan Bali sebagai Kerajaan Semu*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.
- Barker, Chris. 2014. *Kamus Kajian Budaya*. Depok: PT Kanisius.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2016. *Postmodern Teori dan Metode*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Mardika, I Nyoman, I Made Mardika, A.A.Rai Sita Laksmi. 2010. Dalam Geriya, I Wayan (ed). 2010. *Pusaka Budaya. Representasi Ragam Pusaka dan Tantangan Konservasi di Kota Denpasar, Bali*. Denpasar: Bappeda Kota Denpasar.
- Putra, I Nyoman Darma, Syamsul Alam Paturusi, Widiastuti. 2017. Denpasar heritage track: Revitalisasi paket wisata 'Denpasar city tour'. *Jurnal Kajian Bali*, Volume 07, Nomor 02, Oktober 2017. Halaman 39-58.
- Sugiharto, Bambang I. 1996. *Postmodernisme. Tantangan bagi Filsafat*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Widiastuti. 2011. Konservasi Kota Denpasar: Harapan dan Kenyataan. *Jurnal Permukiman NATAH*. Volume 9, Nomor 1. Pebruari 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 2017. Tentang Pemajuan Kebudayaan*.

*) Makalah disampaikan dalam Seminar Kota Denpasar dengan Tema: Pelestarian Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan di Era Disruption pada tanggal 6 Juni 2018 di Denpasar